

Prosiding Seminar Nasional

Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen

<https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index>

Vol 3, Tahun 2019 | Halaman 269 - 271

Peran Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Desa Melkiades Sala¹, Suciati², Didik Iswahyudi³

Universitas Kanjuruhan Malang Indonesia

ekhymelkiades@gmail.com

Informasi artikel

Kata kunci:

Peran
Kepala Desa
Pembangunan

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan tentang peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan, melalui peranya sebagai pemimpin desa dalam membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, dan anggaran yang di gunakan. Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, hubungan .Kepala Desa dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan serta peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan masih tergolong lemah, bahkan kepala desa seolah tidak terlihat fungsinya serta partisipasi masyarakat masih belum terlihat dalam menggerakkan pembangunan infrastruktur desa serta kegiatan-kegiatan lainnya. kepala desa tidak pernah melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Copyright ©2019 Melkiades Sala¹, Suciati², Didik Iswahyudi³All Right Reserved

Pendahuluan

Pengembangan dan pembangunan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten atau kota (Apandi, 2017). Desa merupakan kasatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau di bentuk dalam sistem pemerintahan Nasional. Menurut (Suparno, 2001) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebinya di sandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Lalu dalam Undang-Undang No. 5/19/1974 di jelaskan lagi tentang Otonomi Daerah adalah lebih menekankan pada penyerahan urusan kepada lembaga pemerintah daerah yaitu pemberian hak, wewenang dan kewajibann untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu dalam pelaksanaan otonomi daerah, akan sangat tergantung dari kemampuan daerah dalam menggali potensi, sumberdaya manusia dan kebijakan-kebijakan yang di keluarkannya. Dalam konteks ini peran desa, baik secara kelembagaan maupun fungsional tidak dapat di kesampingkan. Dalam hal ini, pembangunan dapat di artikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Dahuri & Nugroho, 2004). Pendekatan keseragaman dalam pembangunan desa dan kelurahan pada zaman orde baru mengakibatkan keanekaragaman karakteristik dan kekayaan masyarakat lokal sangat diabaikan dalam proses perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan. Padahal masyarakat lebih memahami kebutuhan dan permasalahan yang harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhan kebutuhannya, merumuskan rencanarencana serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya. Kita memahami bahwa pembangunan di butuhkan untuk memecahkan berbagai masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dsb. Pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak masyarakatnya ternyata tidak diwujudkan. (Fadil, 2013).

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2017 tentang Desa pada pasal 1(13) mengatakan bahwa Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah (Dalam & Republik, 2017). Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut jelas diamanatkan kepada kepala desa untuk menyelenggarakan pembangunan Desa. Tentunya dengan segala kapasitas yang diberikan kepadanya salah satunya menggunakan partisipasi masyarakat.

Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Menurut (Soekanto, 2002) “pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang di rencanakan dan di kehendaki” dari pendapat ini di kemukakan bahwa pembangunan dari proses perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat, sebab di dasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemudian Menurut (Fakih, 2001) Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya.

Dari penjelasan diatas maka kepala desa sangatlah berperan penting dalam mengurus rumah tanganya sendiri. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menyebutkan kepala desa yaitu bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. (Nomor, 6AD) Oleh karena itu kepala desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa, Ia merupakan pemimpin terhadap jalanya roda pemerintahan yang ada di desa. Menurut (Nurcholis, 2011) Kepala desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Jadi kepala desa sebagai kepalah pemerintahan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan desa yang baik karena dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa tersebut. Kepala desa adalah yang paling memegang peranan dalam masyarakat yang menjadi wakil rakyat yang terpilih secara langsung oleh masyarakat desanya. Seorang pemimpin sangat penting dalam mengayomi kinerja pemerintahan yang dijalankannya terlebih ditengah pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, maka hal yang paling menentukan adalah sikap profesionalitas dari aparat pemerintahan. Khususnya pejabat yang memimpin lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Seorang figur Kepala Desa (pemimpin) diharapkan dapat mewujudkan peubahan-perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. (Kartanegara & Si, 2014)

Berdasarkan pengamatan penulis yang terjadi di lapangan, Peran dari Kepala Desa dan perangkat desa dalam pelaksanaan pembangunan masih tergolong lemah, bahkan seolah tidak terlihat fungsinya dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa serta kegiatan-kegiatan yang yang yang lain. Beberapa infrastruktur yang ada di lapangan suda tidak lagi mnjamin untuk di gunakan oleh masyarakat, seperti jalan penghubung antara kampung. Hal ini menuntut pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya untuk membenahi ruas-ruas jalan maupun yang lainnya. Di sini peran kepala desa dan aparat desa sangat menentukan dalam pembangunan desa. Kepala desa harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat agar mereka bisa melakukan aktifitas mereka dengan nyaman.

Maka penulis berpandangan bahwa mengenai kajian”Peran Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan, hal ini memang cukup urgen untuk dikemukakan. Perlu dijelaskan bahwa beberapa gejala yang dijumpai dari hasil prasarvei, memberikan acuan sebagai gambaran tentang sejauh mana pelaksanaan tugas yang dipikul oleh Kepala Desa dapat dijalankan. Dalam arti kemampuan seorang pemimpin masyarakat, dalam hal ini Kepala Desa menjalankan amanah dan tanggung jawab baik berupa wewenang dan tanggung jawab di bidang pemerintah, Pembangunan serta kemasyarakatan secara baik akan tergantung pada tingkat pendidikan yang dimilikinya. Peran kepala desa sangatlah di diharapkan

sebagai kepala pemerintahan desa dalam meningkatkan pembangunan desa baik di bidang fisik maupun di yang lainnya.

Metode

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam hal ini penulis mengumpulkan segala bentuk informasi yang ada dan terperinci serta mengidentifikasi masalah, di sini penulis melakukan penelitian yang sifatnya keilmuan. Oleh karena itu maka harus terjun langsung ke tempat penelitian karena tidak bisa diuji di laboratorium karena sifatnya yang deskriptif, sehingga penulis bisa mendeskripsikan keadaan yang ada di lapangan secara langsung. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi berdasarkan sumber data yang diperoleh.

Hasil dan pembahasan

Keberhasilan pembangunan suatu desa akan tidak lepas dari peran kepala desa sebagai pemimpin yang ada di suatu wilayah desa. Hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah desa itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan, melalui peranya sebagai seorang pemimpin desa dalam membuat kebijakan-kebijakan, keputusan, dan juga untuk membuat anggaran. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan.

Adapun teknik penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian menggunakan observasi ini diharapkan akan mendapatkan data sehingga akan diketahui upaya apa saja yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian tentang peran dari seorang kepala desa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin yang ada di wilayahnya. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Sedangkan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar.

Temuan penelitian dilapangan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa, kiranya di ketahui perkembangan pembangunan di daerah yang selama ini di lakukan oleh pemerintah karena walau bagaimanapun peran pemerintah dalam pembangunanyang selama ini tidak terlepas dari peran masyarakat maka keberadaan masyarakat juga tidak dapat di pandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara dan dalam kegiatan pembangunan. Menurut (Suwandi & Rostyaningsih, 2012), "partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan harus diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiaporang tanpa berarti mengorban kepentingan diri sendiri". Selanjutnya disebutkanpula bahwa dalam keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat merupakan ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan mereka untukmenentukan nasibnya sendiri, maka semakin besar pula kemampuan merekadalam pembangunan.

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan partisipasi masyarakat sangat di butuhkan dalam pelaksanaan pembangunan. Terjadinya mis komunikasi anantara pemerintah Desa dengan masyarakat menyebabkan lambatnya suatau pembangunan. Jika suatu pekerjaan di kerjakan secara bersama-sama maka akan membawakan hasil yang baik. Dengan demikian seperti yang terjadi di Desa Girimulyo hubungan antara kepala desa dan masyrakat masi sangat di perhatikan. Jika di lihat kerja dari kepala desa saat ini mengenai peran kepala desa saat ini belum dikatakan maksimal.

Contohnya saja saat ada kegiatan seperti kerja bakti, pembuatan pengerasan jalan, sosialisasi, serta untuk mengumpulkan masyarakat kepala desa selalu menjauh. Bahkan masyarakat pun jika ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan kegiatan di desa hanya sebagian kecil masyarakat yang hadir. Kepala desa tidak perna turun langsung dan mencari tahu apa sebenarnya kendala dari masyarakat. Hal ini sebenarnya menjadi catatan untuk kepala desa agar turun langsung menemui masyarakat dan mencari tahu mengapa masyarakat tidak hadir. Hubungan kepala desa dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa, berdasarkan temuan penelitian di lapangan dalam hubungan antara kepala desa dengan masyarakat dalam hal menggerakkan pembangunan harus selalu bersatu. Dalam temuan penelitian di lapangan hubungan kepala desa dengan masyarakat masi tergolong lemah, di mana kepala desa jarang berbaur dengan masyarakat. Selama ia menjabat kepala desa kurang lebih dua setenga tahun dia hanya

sekedar lambangnya saja, hanya satu saja ruas jalan yang ia kerjakan. Sebagai seorang pemimpin di sini dia harus menggerakkan segala program-program yang berkaitan dengan pembangunan desa agar masyarakat bisa aktif. Selain itu, kepala Desa juga membina kehidupan masyarakatnya tidak hanya melalui kegiatan formal tetapi juga melalui kegiatan nonformal.

Kepala desa harus lebih sering mengajak warganya untuk berdialog dan berbincang-bincang secara terbuka. Sebaliknya hanya sebagian kecil masyarakat yang melakukan pengaduan kepada aparatnya selebihnya masyarakat selalu terdiam dan tidak pernah berinteraksi dengan kepala desa dan aparat desa. Hal ini disebabkan karena kepala desa selalu keluar dan tidak pernah menetap di desa tersebut. Partisipasi antara kepala desa dan masyarakat dalam pembangunan merupakan upaya untuk memberdayakan potensi yang ada di masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah. Pada dasarnya kemampuan berkomunikasi dalam perspektif kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dimaksudkan sebagai upaya yang sadar, terarah dan terencana dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan dan pemerintahan yang wajib diketahui secara jelas oleh masyarakat sehingga mereka dapat mengambil bagian sesuai dengan kemampuan dan situasi dimana perannya dapat dilakukan. (Paembonan, n.d.)

Peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa, berdasarkan temuan penelitian yang ada di lapangan yaitu di Desa Girimulyo, Peran dari Kepala Desa dan perangkat desa dalam pelaksanaan pembangunan masih tergolong lemah. Bahkan seolah tidak terlihat fungsinya dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur Desa serta kegiatan-kegiatan yang lain. Beberapa pembangunan di bagian infrastruktur di Desa Girimulyo sendiri sudah banyak yang rusak seperti jalan, serta selokan. Hal ini menuntut pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya untuk membenahi atau melaksanakan perbaikan. Dimana pembangunan seharusnya memberikan hasil-hasil yang nyata bagi masyarakat.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan lambatnya pembangunan yaitu minimnya tingkat pendidikan yang didapat dari seorang pemimpin khususnya kepala desa Girimulyo mengakibatkan pengaruhnya pembangunan serta pergaulan antara masyarakat. Oleh sebab itulah suksesnya pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas dari seorang pemimpin serta jajarannya. Keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak terlepas dari kinerja selama ia memimpin. Hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. ("Analisis_kebijakan_publik_konsep_teoris_d," n.d.)

Dengan demikian maka peran Kepala Desa sangat penting diperlukan dalam proses pembangunan desa, yaitu untuk memperlancar pembangunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Disini Peneliti menunjukkan bahwa Kepala Desa sangat berperan dalam memotivasi, memfasilitasi, dan menggerakkan warga disetiap kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi yang ada di lembaga desa, sebagai kepala desa dia harus bertanggung jawab atas jabatannya, untuk memajukan pembangunan yang ada wilayahnya sendiri. Oleh karena itu kepala desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa. Selain itu juga kepala desa juga memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada di desa. Sebagaimana di jelaskan di atas Di desa Girimulyo terdapat program-program yang berkaitan dengan program pembangunan.

Simpulan

Keberhasilan pembangunan suatu desa akan tidak lepas dari peran kepala desa sebagai pemimpin yang ada di desa, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah desa itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan, melalui perannya sebagai seorang pemimpin desa dalam membuat kebijakan-kebijakan, keputusan, dan juga untuk membuat anggaran. Peran Kepala Desa dalam hal pembangunan fisik maupun non fisik sangat dibutuhkan. Kedudukan Kepala desa sebagai kepala pemerintahan dan pembangunan serta pemimpin formal masyarakat sangatlah penting di

dalam kelancaran pembangunan sehingga mengharuskan Kepala Desa mempunyai aparatur yang ahli di bidangnya. Sehingga program dan tugas pemerintah desa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pembangunan non fisik kepala desa berperan penting terutama dalam pemberdayaan masyarakat yang bersifat sosial ekonomi. Pembinaan merupakan salah satu unsur pendukung dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik bagi perangkat desa maupun masyarakat. Tujuannya adalah agar perangkat desa dan masyarakat mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan serta timbul kemauan untuk terlibat aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Pembinaan dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kearifan lokal yang memang sudah dari dulu dianut oleh masyarakat desa seperti semangat gotong royong yang saat ini mulai terkikis dengan budaya luar yang hanya mementingkan diri sendiri, dan itu patut untuk ditumbuhkan kembali.

Saran

Bagi kepala desa

Perlu ditingkatkannya lagi peran Kepala Desa terutama dalam bidang pembangunan desa. Kepala Desa harusnya melibatkan BPD dalam perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa Girimlyo hendaknya melakukan sosialisasi dan menyediakan fasilitas-fasilitas kepada masyarakat dan memberikan perlengkapan yang dibutuhkan aparatur desa agar bias menjalankan tugasnya lebih baik lagi. Kepala Desa harus mempunyai perencanaan yang lebih terencana lagi sehingga kebutuhan dan tuntutan masyarakat bisa terpenuhi.

Bagi masyarakat

Masyarakat harus jeli dalam memilih pemimpin agar tidak terdapat perbedaan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan. Artinya masyarakat harus mampu memilih pemimpin yang bisa bertanggung jawab dalam memimpin suatu wilayah atau negara, agar bisa merangkul semua lapisan masyarakat, agar bisa membangun daerahnya atau wilayahnya. Penelitian ini juga di lakukan untuk menambah wawasan dalam memecah suatu masalah yang ada di masyarakat. Manfaat penelitian bagi masyarakat dapat membantu untuk memberikan rekomendasi bagi suatu kebijakan, serta program yang suda di canangkan oleh sebuah dinas atau instansi maupun kelompok masyarakat, di mana hal tersebut dapat meningkatkan kinerja dari para pelaksana program.

Referensi

Analisis_kebijakan_publik_konsep_teor_i_d. (n.d.).

Apandi, A. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Kecamatan Long Mesangat Kabupaten, 5(2), 711–720.

Dahuri, R., & Nugroho, I. (2004). Pembangunan Wilayah. *LP3ES, Jakarta. Indonesia.*

Dalam, M., & Republik, N. (2017). No Title.

Fadil, F. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal, II*(8), 287–294. Retrieved from <http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/897>

Fakih, M. (2001). *Sesat pikir: teori pembangunan dan globalisasi*. Insist Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.

Kartanegara, K. K., & Si, M. (2014). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menggerakkan Pembangunan Di Desa Kota Bangun Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Muhammad, 2(1), 2008–2021.

Nomor, U.-U. R. I. (6AD). tahun 2014 tentang Desa. *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 5495.*

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.

Paembonan, L. C. S. (n.d.). Pemerintahan Dan Partisipasi Masyarakat, 237–254.

Soekanto, S. (2002). Teori peranan. *Jakarta: Bumi Aksara.*

Suparno, P. (2001). *Teori perkembangan kognitif jean piaget*. Kanisius.

Suwandi, S., & Rostyaningsih, D. (2012). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. *Journal of Public Policy and Management Review, 1*(2), 261–270.